

## Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan *Accounting Information System* sebagai Pemoderasi

Ambarwati

Universitas Putra Indonesia YPTK

[ambarawati@yahoo.com](mailto:ambarawati@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan accounting information system sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di BPKAD di Kota Padang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel di dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada BPKAD Kota Padang dengan ketentuan bahwa responden yang bersangkutan minimal telah bekerja selama satu tahun pada BPKAD Kota Padang tersebut, adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan uji interaksil menunjukkan bahwa pemanfaatan accounting information system tidak memoderasi akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Kinerja Instansi Pemerintah, *Accounting information system*.

*Jurnal of Business and Economics is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.*



### 1. Pendahuluan

Kondisi kinerja bidang ekonomi dan politik di negara Indonesia telah membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance. Terselenggaranya good governance merupakan tingkat dari kejujuran Pemerintah dan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Dengan demikian sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.

Untuk menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas, peran penyusun kinerja instansi pemerintah menjadi sangat penting. Penyusun kinerja instansi pemerintah hendaknya melakukan penerapan sistem pengendalian internal dengan transparan dan mentaati peraturan perundangan yang telah berlaku untuk ditaati pada kinerja instansi pemerintah tersebut (Asmawanti et al., 2020). Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi

Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktik fraud yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Menurut Theft Act 1968, salah satu jenis praktik fraud adalah korupsi.

Fenomena yang terjadi baru-baru ini yaitu adanya 13 orang tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dalam kasus ganti rugi lahan tol di Kabupaten Padang Pariaman. Total kerugian yang dialami pemerintah mencapai Rp.27.859.178.142. Penyidikan kasus dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang, Kejaksaan Negeri Padang Sumatra Barat telah memeriksa 24 saksi dari pengurus cabang olahraga tersebut. Dari kasus tersebut mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Padang. Mantan ketua KONI tersebut diperiksa terkait dugaan korupsi dana KONI Padang senilai Rp 2 M.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan

tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah (Dewi, 2018). Saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya good governance, yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.

Kinerja merupakan suatu hasil atau kondisi yang perlu diketahui dan dilaporkan kepada pihak tertentu guna mengetahui melihat pencapaian hasil dari suatu instansi dengan tujuan yang diemban oleh suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan operasional tersebut. Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah yang baik memiliki hasil dari kegiatan atau kinerja program yang telah direncanakan berhasil dalam mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah telah berupaya menerapkan prinsip good governance, dengan tujuan agar penataan pemerintahan lebih baik dan negara menjadi lebih baik pula. Penerapan good governance mulai menjadi tuntutan masyarakat Indonesia terutama sejak digulirkannya tuntutan reformasi disegala bidang pada tahun 1997 (Perwirasari, 2016).

Organisasi sektor publik merupakan salah satu pemerintah daerah yang dituntut untuk bertanggungjawab memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memberikan pembagian tugas yang baik bagi pemerintah. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Otonomi daerah yang seluas-luasnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, kualitas dan pemberdayaan masyarakat. Penjelasan (Mahayuni et al., 2017) dengan bergulirnya otonomi daerah yang merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan laporan keuangan. Pada organisasi sektor publik, masih banyak terdapat fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan informasi yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Namun ada beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu kualitas kerja aparatur yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, ketidak sesuaian aparatur dengan bidang kerjanya, kurang terampilnya aparatur pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dan kondisi kapasitas administratif pegawai yang tidak memadai.

Pengelolaan keuangan daerah sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Akuntabilitas adalah tindakan pertanggung jawaban guna mencapai tujuan secara berkala pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu organisasi (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Fakta yang terjadi di dalam praktik di lapangan masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merupakan oknum dari pemerintah. Salah satu penyimpangan yang masih sering terjadi adalah lemahnya pengendalian yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta masih terdapat penyelewengan dana yang digunakan untuk kegiatan diluar rencana pembangunan. Hal ini menyebabkan

adanya beberapa tujuan dari instansi pemerintah yang telah direncanakan tidak tercapai. Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah menerbitkan suatu dasar hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan aturan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai salah satu media yang digunakan untuk mempertanggung jawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Tentu, dukungan dari masyarakat dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah akan sangat membantu terwujudnya semua harapan atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Asmawanti et al., 2020).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi keuangan yaitu wujud pertanggungjawaban pemerintah (PP No.71 Tahun 2010). Transparansi merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional (Aprianti & Riharjo, 2019).

Tuntutan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah melakukan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD yang dinamakan reformasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Hal itu dilakukan agar terwujud pemerintah yang dapat dipercaya, profesional dan akuntabel. Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Ketentuan

ini telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Hal yang tak kalah penting untuk melihat faktor-faktor kinerja instansi pemerintah selain akuntabilitas dan transparansi adalah pengawasan. Menurut (Benawan et al., 2018) Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang sekarang menjadi Organisasi Perangkat daerah (OPD) merupakan unit kerja pemerintah yang mendapat perincian dari publik terpaut dengan pelaksanaan anggaran. OPD dituntut agar meningkatkan pelayanan publik digambarkan dengan Value for Money dalam melangsungkan kegiatannya. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan Value for Money dikarenakan masih banyak anggaran yang belum maksimal dilakukan secara ekonomi yaitu biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran yang digunakan tidak berdasar pada kebutuhan sesuai skala prioritas dan anggaran yang boros. OPD sebaiknya dapat memperbaiki hal-hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak berpedoman pada Value for Money. Setiap OPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan dana, dan juga selalu merugi. Value for money merupakan prinsip yang digunakan sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang baik. Perwujudan prinsip Value for money diyakini dapat memperbaiki kinerja pada sektor publik. Setiap OPD seharusnya bisa dapat merubah sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasar pada Value for money. Value for money harus dilakukan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, Value for money merupakan penghubung untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai good governance yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien (Arifani et al., 2018).

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
- H2 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
- H3 : Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
- H4 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan

- pemanfaatan accounting information sebagai pemoderasi.
- H5 : Transparasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan accounting information sebagai pemoderasi.
- H6 : Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan accounting information sebagai pemoderasi.

## 2. Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kota Padang. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai yang bekerja pada BPKAD di Kota Padang yang berjumlah 56 orang. Adapun sampel yang menjadi wakil dari populasi tersebut yang berjumlah 56 orang.

Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis data ini dengan

menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan metode interaksi. Moderated Regression Analysis merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier untuk menentukan hubungan antara dua variable yang dipengaruhi oleh variable ketiga atau variable moderating. Untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi digunakan uji interaksi yaitu Moderated Regression Analysis (MRA). Model persamaan regresi yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z + \epsilon$$

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Analisis regresi moderasi digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat dengan moderasi variabel tertentu. Analisis regresi moderasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengawasan (X3) mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Y) melalui Accounting information system (Z). Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis regresi moderasi:

**Tabel 1**  
**Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-35.996	48.405			-.744	.461
AKUNTABILITAS (X1)	.193	2.089	-.241	-.092	.927	
TRANSPARANSI (X2)	.493	2.405	.575	.205	.839	
PENGAWASAN (X3)	-.633	2.253	-.833	-.281	.780	
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM (Z)	.188	.106	.162	1.766	.084	
AKUNTABILITAS*ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM (X1*Z)	.701	4.483	.407	.156	.876	
TRANSPARANSI*ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM (X2*Z)	-.467	5.262	-.252	-.089	.930	
PENGAWASAN*ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM (X3*Z)	2.060	5.224	1.173	.394	.695	

Dari hasil tabel koefisien 4.13 menunjukkan nilai koefisien uji t dan nilai koefisien dalam persamaan regresi moderasi. Nilai persamaan yang dipakai adalah berada pada kolom B (koefisien). Standar persamaan regresi linear berganda adalah dapat diperoleh sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 Z + \beta_6 X_2 Z + \beta_7 X_3 Z + \epsilon$$

$$Y = -35,966 - 0,193 (X_1) + 0,493 (X_2) - 0,633 (X_3) + 0,188 (Z) + 0,701 (X_1*Z) - 0,467 (X_2*Z) + 2,060 (X_3*Z) + \epsilon$$

Berdasarkan tabel diatas maka pengaruh tersebut terlihat dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$1. \quad a = -35,966$$

Konstanta sebesar -35,966 artinya jika variabel independen Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengawasan (X3) melalui Accounting information system (Z) dianggap tidak ada atau sama dengan 0 (nol), maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki nilai sebesar -35,966.

$$2. \quad b_1 = -0,193$$

Koefisien variabel Akuntabilitas (X1) sebesar -0,193. artinya jika Akuntabilitas (X1) mengalami kenaikan

sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,193, sebaliknya jika Akuntabilitas (X1) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,193 dengan syarat variabel bebas lainnya bernilai tetap.

$$3. \quad b_2 = 0,493$$

Koefisien variabel Transparansi (X2) sebesar 0,493. artinya jika Transparansi (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,493, sebaliknya jika Transparansi (X2) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,493 dengan syarat variabel bebas lainnya bernilai tetap.

$$4. \quad b_3 = -0,633$$

Koefisien variabel Pengawasan (X3) sebesar -0,633. artinya jika Pengawasan (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,633, sebaliknya jika Pengawasan (X3) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,633 dengan syarat variabel bebas lainnya bernilai tetap.

$$5. \quad b_5 = 0,188$$

Koefisien variabel Accounting information system (Z) sebesar 0,188. artinya jika Accounting information system (Z) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,188, sebaliknya jika Accounting information system (Z) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,188 dengan syarat variabel bebas lainnya bernilai tetap.

$$6. \quad b_6 = 0,701$$

Koefisien variabel Akuntabilitas melalui Accounting information system ( $X_1*Z$ ) sebesar 0,701. artinya jika Akuntabilitas melalui Accounting information system ( $X_1*Z$ ) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka

Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,701, sebaliknya jika Akuntabilitas melalui Accounting information system ( $X_1*Z$ ) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,701 dengan syarat variabel bebas lainnya bernilai tetap.

$$7. \quad b_7 = -0,467$$

Koefisien variabel Transparansi melalui Accounting information system ( $X_2*Z$ ) sebesar - 0,467. artinya jika Transparansi melalui Accounting information system ( $X_2*Z$ ) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,467, sebaliknya jika Transparansi melalui Accounting information system ( $X_2*Z$ ) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,467 dengan syarat variabel bebas lainnya bernilai tetap.

$$8. \quad b_7 = 2,060$$

Koefisien variabel Pengawasan melalui Accounting information system ( $X_3*Z$ ) sebesar 2,060. artinya jika Pengawasan melalui Accounting information system ( $X_3*Z$ ) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 2,060, sebaliknya jika Pengawasan melalui Accounting information system ( $X_3*Z$ ) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 2,060 dengan syarat variabel bebas lainnya bernilai tetap.

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh yang signifikan dari variabel independen atau variabel dependen Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengawasan (X3) mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Y) melalui Accounting information system (Z). Berdasarkan hasil pengujian statistik (uji F) dapat dilihat pada tabel output berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	590.390	84.341	31.980	.000 <sup>b</sup>
	Residual	126.592	2.637		
	Total	716.982			

Berdasarkan tabel 2 bahwa hasil Fhitung sebesar  $31,980 > F_{tabel} 2,207$  dengan taraf signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengawasan (X3) mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah (Y) melalui Accounting information system (Z) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi atau kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Ketentuan nilai  $R^2$  antara 0-1, jika  $R^2$  mendekati 0 maka kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat sangat terbatas.

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.907 <sup>a</sup>	.823	.798	1.62399

Berdasarkan tabel 4.16 bahwa diperoleh nilai R square sebesar 0,823 yang berarti  $0,823 \times 100\% = 82,30\%$  yang berarti bahwa variabel bebas mempunyai kontribusi sebesar nilai 82,30%. Dengan demikian perubahan Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi oleh Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengawasan (X3) melalui Accounting information system (Z) sebesar 82,30% dan sisanya ( $100\% - 82,30\% = 17,70\%$ ) sebesar 17,70% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian.

### Pembahasan

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dapat diketahui bahwa variabel Akuntabilitas (X1) didapatkan thitung sebesar  $1,217 < ttabel\ 2,005$  dengan nilai signifikan  $\alpha\ 0,229 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis ditolak. Bawa Akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Koefisien variabel Akuntabilitas (X1) sebesar -0,193. artinya jika Akuntabilitas (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,193, sebaliknya jika Akuntabilitas (X1) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,193 dengan syarat variabel bebas lainnya bernali tetap. Ini berarti hubungan akuntabilitas dengan kinerja instansi pemerintah tidak searah dengan kinerja instansi pemerintah pada BPKAD di Kota Padang. Dapat diartikan bahwa adanya akuntabilitas didalam kinerja yang dimiliki Kantor BPKAD di Kota Padang maka tidak berpengaruh dengan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian (Arifani et al., 2018) bahwa pertanggungjawaban pada suatu entitas dalam menyajikan informasi mengenai keputusan atau program yang telah diambil, tidak memberikan pengaruh pada kinerja anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis. Di sisi lain, pertanggungjawaban kepada masyarakat pun sangat penting, karena masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan.

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Diketahui bahwa variabel Transparansi (X2) mempunyai thitung mempunyai nilai sebesar  $3,120 > ttabel\ 2,005$  dengan nilai signifikan  $\alpha\ 0,003 < 0,05$ . Dengan demikian nilai thitung > nilai ttabel .Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis diterima. Artinya

bawa variabel Transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Koefisien variabel Transparansi (X2) sebesar 0,493. artinya jika Transparansi (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,493, sebaliknya jika Transparansi (X2) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,493 dengan syarat variabel bebas lainnya bernali tetap. Sejalan dengan penelitian (Arifin et al., 2020) bahwa Sebagian besar pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan menganggap penerapan transparansi memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, khususnya pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang keuangan harus lebih transparansi dalam memberikan informasi kepada pimpinan maupun masyarakat. Transparansi, apabila informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik.

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Diketahui bahwa variabel Pengawasan (X3) mempunyai thitung mempunyai nilai sebesar  $3,532 > ttabel\ 2,005$  dengan nilai signifikan  $\alpha\ 0,001 < 0,05$ . Dengan demikian nilai thitung > nilai ttabel .Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis diterima. Artinya bahwa variabel Pengawasan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Koefisien variabel Pengawasan (X3) sebesar -0,633. artinya jika Pengawasan (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,633, sebaliknya jika Pengawasan (X3) turun sebesar 1 satuan, maka Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,633 dengan syarat variabel bebas lainnya bernali tetap. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan yang telah dilakukan maka hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik akan meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan tugas dan juga untuk mendorong terwujudnya pertanggung jawaban atas pelaksanaan program atau kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, good governance, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan digunakan untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang dapat diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Tujuan pengawasan sendiri pada dasarnya untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat segera diambil tindakan koreksi. Sejalan dengan penelitian (Arifani et al., 2018) bahwa semakin meningkatnya pengawasan yang dilakukan di dalam suatu entitas, maka semakin meningkat pula kinerja anggaran.

Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan accounting information system dalam memoderasi akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa variable koefisien beta unstandardized sebesar 0.701 dan tingkatt signifikansi 0.876 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variable system informasi akuntansi bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, pemanfaatan accounting system dianggap variabel moderating apabila tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan memenuhi harapan secara tepat waktu (timely), akurat (accurate), dan dapat dipercaya (reliable), dimana dalam mewujudkannya dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai dan maksimal. Instansi pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ketahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit, dan kompleks (Arifin et al., 2020).

Hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan accounting information system dalam memoderasi transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa variable koefisien beta unstandardized sebesar -0.467 dan tingkat signifikansi 0.930 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan accounting system bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Maka hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak. Menurut (Arifin et al., 2020) Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (extra ordinary) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Jangan sampai timbul kesan bagi para pejabat pemerintah,

asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan.

Hipotesis keempat (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan accounting information system dalam memoderasi transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa variable koefisien beta unstandardized sebesar 2.060 dan tingkat signifikansi 0.695 yang lebih besar dari 0,05. pemanfaatan accounting system dianggap variabel moderating apabila tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan accounting system bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah, Maka hipotesis keenam (H6) yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak. Menurut (Benawan et al., 2018) Pengawasan diperlukan dalam sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini serta berdasarkan data dan informasi yang telah didapat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada BPKAD kota Padang. Hal ini mengindikasikan bahwa, dengan adanya pertanggung jawaban kepada publik dan golongan belum menjadi kepentingan utama. Variabel Transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada BPKAD kota Padang. Hal ini dikarenakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam artian informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus secara langsung dapat diperoleh oleh pihak yang membutuhkan. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kinerja suatu instansi, maka dapat diasumsikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut dapat terbentuk. Variabel Pengawasan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada BPKAD kota Padang. Hal ini dikarenakan pengawasan digunakan untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang dapat diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa pemanfaatan accounting information system tidak

memoderasi hubungan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa penerapan prinsip transparansi pada suatu organisasi tidak membutuhkan sistem informasi akuntansi sebagai tolak ukur penerapan prinsip transparansi, karena yang menjadi tolak ukur terlaksananya penerapan prinsip transparansi dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui sistem pemerintahan yang jujur dan terbuka. Dengan adanya transparansi mendorong kepercayaan publik sehingga tercapainya kinerja instansi yang baik. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa pemanfaatan accounting information system tidak memoderasi hubungan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa efektifnya penerapan prinsip pengawasan pada suatu organisasi tidak memerlukan adanya sistem informasi akuntansi karena yang menjadi tolak ukur terlaksananya penerapan prinsip pengawasan dapat dilihat dari keterlibatan para pegawai maupun pimpinan dari BPKAD Kota Padang tersebut dalam mewujudkan prinsip itu sendiri. Jika pengawasan dilakukan dengan baik maka dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan, sehingga kinerja dapat dikatakan dengan baik.

## Daftar Rujukan

- Aprianti, E. R., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(12), 1–17.
- Arifani, C., Dr. Agustinus Salle, SE., M. E., & Andika Rante, SE., M. S. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68–81.
- Arifin, W. U., Muchlis, S., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fairness Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and ...*, 1, 67–82. <http://103.55.216.56/index.php/isafir/article/view/17616>
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850>
- Aulia Sholichah Iman Nurhotimah. (2021). *PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK*. Jejak Pustaka.
- Azis, M. I. (2020). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Application of Accountability Performance of Government Institutions (Sakip) in Gunungkidul Government. *Jurnal Ekonomika*, 11(1), 51–62. <http://180.250.193.171/index.php/ekonomika/article/view/1246>
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 72–79. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.19995.2018>
- Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v7i2.236>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. PENERBIT ANDI YOGYAKARTA.
- Febriana, L., Wardayati, S. M., & Prasetyo, W. (2017). The Effect of Internal Control Factors on the Accountability of the Auditor at the Inspectariate of Jombang District. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 166–175. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.9308>
- Firmansyah, D. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar. *Economics Bosowa Journal Edisi Xxiv Januari s/d Maret 2018*, 4(001), 165–177.
- Harnovinsah, Al-Hakim, Y., Erlina, & Muda, I. (2020). Effect of accountability, transparency and supervision on budget performance. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra 7), 130–143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009622>
- Ismail, N., & Sri, H. (2019). METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL. Media sahabat Cendikia.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Mahayuni, N. P. S., Yuniarta, G. A., & Julianto, I. P. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *Akuntansi*, 8(2), 4.

- Manggaukang, R. (2006). AKUNTABILITAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI. UMMPress.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif R&B. Alfabeta.
- Suharyanto, D., Tanto, D., & Putro, A. (2018). Analisis Pengawasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV Tiga Putra Penataran, 3 No. 1, 81–92.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM, 2(1), 52–66.
- Umar, H. (2011). Metode Penelitian Untuk Sripsi dan tesis Bisnis. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Z. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Kolegial, 6(2), 136–148.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk7>
- Umar, Z., & Syawalina, C. F. (2018). Instansi Inspektorat Aceh. Akuntansi Dan Manajemen, 6(2), 136–148.
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>